



IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI KOTA CIMAH

Andrian Suherman Putra¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian berjudul “Implementasi Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Cimahi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Cimahi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi program menurut David C. Korten (1984) yang mencakup tiga indikator: program, organisasi pelaksana, kelompok sasaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), petugas layanan terkait, serta unsur masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KLA di Kota Cimahi telah berjalan melalui berbagai program dan kegiatan pada lima klaster hak anak. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor yang belum maksimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Kota Layak Anak.

Kata Kunci: Implementasi Program, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak, Kebijakan publik, Kota Cimahi.

Abstract

The research is titled "Implementation of the Child-Friendly City Program in an Effort to Fulfill Children's Rights in Cimahi City". This study aims to analyze the implementation of the Child-Friendly City Program in an effort to fulfill children's rights in Cimahi City. The theory used is the theory of program implementation according to David C. Korten (1984) which includes three indicators: program, implementing organization, target group. The research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observations, and documentation with informants from the Women's Empowerment and Child Protection Office, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB), related service officers, and community elements. The results of the study show that the implementation of the KLA Program in Cimahi City has been running through various programs and activities in five children's rights clusters. However, the

implementation is not fully optimal because there are still obstacles in the aspects of the program, implementing organization, and target groups, such as limited resources, cross-sector coordination that has not been maximized, and low community participation. This research is expected to be an evaluation material for local governments in increasing the effectiveness of the implementation of the Child-Friendly City Program.

Keywords: Program Implementation, Child-Friendly City, Child Protection, Public Policy, Cimahi City.

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek pembangunan yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi. Pemenuhan hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga masyarakat dan negara sebagai pemangku kepentingan utama dalam menjamin keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan anak. Dalam konteks pembangunan nasional, kualitas pemenuhan hak anak menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan manusia. Namun, dalam praktiknya, berbagai persoalan terkait anak masih sering ditemukan di berbagai daerah, seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi, penelantaran, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, khususnya di tingkat daerah.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak anak, Pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan Program Kota Layak Anak (KLA). Program ini dirancang sebagai strategi pembangunan berbasis hak anak yang bertujuan untuk mengintegrasikan sumber daya, kebijakan, serta program pemerintah daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep Kota Layak Anak menekankan pemenuhan lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus (KemenPPPA, 2021). Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Keberhasilan Program Kota Layak Anak sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi lokal. Implementasi program tidak hanya menuntut adanya regulasi dan perencanaan yang jelas, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi lintas sektor yang efektif. Tanpa dukungan tersebut, program yang dirancang berpotensi berjalan secara administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pemenuhan hak-hak anak.

Tabel 1.1 Jenis Kasus Terhadap Anak di Kota Cimahi

No	Jenis Kasus	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kekerasan terhadap anak	20	9	13	45	28	25
2.	KDRT	7	5	7	24	12	17
3.	Penelantaran	0	1	6	2	8	4
4.	<i>Trafficking</i>	1	0	0	0	1	1
5.	Kekerasan Fisik	8	1	2	2	7	2
6.	Dll (LGBT,ITE,Penipuan)	6	2	6	1	7	17
7.	TPPO	0	0	0	0	0	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi, 2024.

Kota Cimahi merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan Program Kota Layak Anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota yang ramah anak. Meskipun demikian, berdasarkan data kasus anak yang tercatat oleh instansi terkait, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak di Kota Cimahi belum sepenuhnya optimal. Kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik, penelantaran, dan kekerasan dalam rumah tangga, masih terjadi secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan Program Kota Layak Anak belum sepenuhnya mampu menekan angka pelanggaran hak anak secara signifikan.

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurut Korten (1984),

keberhasilan implementasi program sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara program yang dirancang, kemampuan organisasi pelaksana, dan karakteristik kelompok sasaran. Apabila ketiga unsur tersebut tidak berjalan selaras, maka tujuan program akan sulit tercapai secara optimal. Dalam konteks Program Kota Layak Anak, implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menyangkut bagaimana organisasi pelaksana bekerja secara terkoordinasi serta sejauh mana masyarakat dan anak sebagai kelompok sasaran berpartisipasi dalam program yang dijalankan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan mengenai bagaimana implementasi Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Cimahi. Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Cimahi dengan menelaah kesesuaian aspek program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Kota Layak Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Cimahi. Objek penelitian adalah pelaksanaan Program Kota Layak Anak, sedangkan subjek penelitian meliputi aparatur pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam program tersebut. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program (Sugiyono, 2013). Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi, dengan alasan bahwa instansi ini merupakan *leading sector* dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan Program Kota Layak Anak di tingkat daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai alat bantu penelitian (Moleong, 2019). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Analisis data dikaitkan dengan model implementasi program yang menekankan kesesuaian antara program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran sebagaimana dikemukakan oleh Korten (1984). Penelitian ini tidak menggunakan model statistik karena berfokus pada pemahaman proses implementasi kebijakan secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Cimahi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak melalui kebijakan publik yang terintegrasi. Program ini dirancang sebagai instrumen pembangunan berbasis hak anak yang menuntut keterlibatan lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah mengadopsi kebijakan nasional terkait Kota Layak Anak dan menerapkannya melalui berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada lima klaster hak anak. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal, terutama jika dikaitkan dengan kondisi riil pemenuhan hak-hak anak di lapangan.

Data kasus anak di Kota Cimahi menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan dan pelanggaran hak anak masih terjadi secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Tabel 1.3 yang menyajikan jenis dan jumlah kasus terhadap anak memperlihatkan bahwa keberadaan Program Kota Layak Anak belum sepenuhnya mampu menekan angka pelanggaran hak anak secara

signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan capaian implementasi, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan Program KLA di Kota Cimahi.

Analisis implementasi Program Kota Layak Anak dalam penelitian ini menggunakan model implementasi program yang dikemukakan oleh Korten. Model ini menekankan bahwa keberhasilan suatu program pembangunan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara tiga unsur utama, yaitu program yang dirancang, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran (Korten, 1984). Ketiga unsur tersebut harus saling mendukung dan berjalan secara seimbang agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Apabila salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka implementasi kebijakan cenderung mengalami hambatan dan tidak memberikan dampak yang signifikan.

1. Program

Pada indikator kesesuaian program, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Program Kota Layak Anak di Kota Cimahi telah dirancang sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan dasar pemenuhan hak anak. Hal ini tercermin dari perencanaan dan pelaksanaan program yang mengacu pada lima klaster hak anak, seperti pengembangan sekolah ramah anak, penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan korban melalui lembaga terkait, serta kegiatan sosialisasi hak anak di lingkungan sekolah dan masyarakat. Program-program tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan isu perlindungan dan pemenuhan hak anak ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

Meskipun demikian, implementasi program di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata anak dan kondisi sosial masyarakat di Kota Cimahi. Beberapa program masih bersifat administratif dan lebih berorientasi pada pemenuhan indikator penilaian Kota Layak Anak, dibandingkan pada upaya substantif untuk menyelesaikan permasalahan anak secara menyeluruh. Program

pengecahan kekerasan, misalnya, masih didominasi oleh kegiatan sosialisasi yang bersifat umum dan belum menyentuh penguatan perlindungan anak berbasis komunitas secara berkelanjutan.

Selain itu, pelaksanaan program belum merata di seluruh wilayah Kota Cimahi. Beberapa kecamatan atau kelurahan telah memperoleh akses program yang relatif lebih baik, sementara wilayah lain masih minim intervensi. Ketimpangan ini menyebabkan manfaat Program Kota Layak Anak belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok sasaran. Dalam perspektif Korten, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian antara desain program dan kebutuhan nyata kelompok sasaran belum sepenuhnya tercapai. Akibatnya, efektivitas program dalam memenuhi hak-hak anak menjadi terbatas dan tidak optimal.

2. Organisasi Pelaksana

Indikator kedua dalam model Korten adalah kesesuaian antara organisasi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi telah berperan sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan Program Kota Layak Anak. DP3AP2KB bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, serta pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, dengan melibatkan perangkat daerah lain serta lembaga pendukung.

Secara struktural, organisasi pelaksana Program Kota Layak Anak di Kota Cimahi telah terbentuk dan memiliki pembagian tugas yang jelas. Namun, dalam praktiknya, koordinasi lintas sektor belum berjalan secara optimal. Beberapa perangkat daerah masih memandang Program Kota Layak Anak sebagai tanggung jawab DP3AP2KB semata, sehingga keterlibatan aktif dan sinergi antarinstansi belum terwujud secara maksimal. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan program yang cenderung terfragmentasi dan kurang terintegrasi.

Selain persoalan koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang perlindungan anak juga menjadi kendala utama. Jumlah petugas yang menangani isu anak tidak sebanding dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sehingga penanganan kasus sering kali bersifat reaktif dan belum berorientasi pada pencegahan jangka panjang. Keterbatasan anggaran juga memengaruhi keberlanjutan program, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan pendampingan intensif dan berkelanjutan.

Dalam kerangka Korten, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas organisasi pelaksana belum sepenuhnya seimbang dengan tuntutan dan kompleksitas Program Kota Layak Anak. Akibatnya, pelaksanaan program cenderung bersifat rutin dan administratif, serta belum mampu menghasilkan dampak yang signifikan terhadap penurunan kasus pelanggaran hak anak. Hal ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas organisasi pelaksana..

3. Sasaran

Indikator ketiga dalam model Korten adalah kelompok sasaran. Kelompok sasaran Program Kota Layak Anak meliputi anak, keluarga, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kelompok sasaran dalam Program KLA di Kota Cimahi masih relatif rendah. Sebagian masyarakat masih memandang isu pemenuhan hak anak sebagai urusan internal keluarga, sehingga kurang terlibat dalam kegiatan sosialisasi, pencegahan, maupun pelaporan kasus pelanggaran hak anak.

Rendahnya partisipasi masyarakat berdampak pada minimnya pemanfaatan layanan pengaduan dan pendampingan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Meskipun fasilitas dan mekanisme pelaporan telah tersedia, masih banyak kasus yang tidak terungkap karena masyarakat enggan melapor atau belum memahami pentingnya perlindungan hak anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa program

yang dirancang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat.

Selain itu, meskipun forum partisipasi anak telah dibentuk sebagai wadah bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, keterlibatan anak dalam proses perencanaan dan evaluasi program belum berjalan secara merata. Partisipasi anak masih bersifat simbolis dan belum sepenuhnya diakomodasi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dan kesiapan kelompok sasaran, khususnya anak, belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perancangan dan pelaksanaan program.

Menurut Korten, program yang tidak selaras dengan kapasitas dan kesiapan kelompok sasaran cenderung sulit diimplementasikan secara efektif. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut, di mana rendahnya partisipasi masyarakat dan anak berdampak langsung pada kurang optimalnya capaian Program Kota Layak Anak di Kota Cimahi. Tanpa dukungan dan keterlibatan aktif kelompok sasaran, program cenderung berjalan secara *top-down* dan kurang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Cimahi telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun belum sepenuhnya berjalan optimal. Ditinjau dari model implementasi Korten, masih terdapat ketidaksesuaian antara program yang dirancang, kapasitas organisasi pelaksana, dan karakteristik kelompok sasaran. Program yang ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata anak, organisasi pelaksana masih menghadapi keterbatasan koordinasi dan sumber daya, serta partisipasi masyarakat dan anak belum merata. Kondisi tersebut menyebabkan capaian pemenuhan hak-hak anak melalui Program Kota Layak Anak di Kota Cimahi belum maksimal dan memerlukan penguatan pada seluruh aspek implementasi.

KESIMPULAN

Implementasi Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Cimahi telah dilaksanakan sebagai bentuk komitmen

pemerintah daerah terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Pada aspek program, berbagai kegiatan yang dirancang telah mengacu pada kebijakan nasional dan lima klaster hak anak, tetapi implementasinya masih bersifat parsial, belum merata di seluruh wilayah, serta belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan nyata dan permasalahan anak di tingkat lokal. Pada aspek organisasi pelaksana, DP3AP2KB sebagai *leading sector* telah menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan program dengan melibatkan perangkat daerah serta lembaga terkait, namun efektivitas pelaksanaan masih terkendala oleh lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia, dan dukungan anggaran yang belum memadai. Sementara itu, pada aspek kelompok sasaran, partisipasi masyarakat dan anak dalam Program Kota Layak Anak masih belum optimal, yang tercermin dari rendahnya keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi, forum partisipasi anak, serta pelaporan kasus pelanggaran hak anak. Ketidaksesuaian antara program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran tersebut menyebabkan tujuan Program Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak-hak anak di Kota Cimahi belum tercapai secara maksimal, sehingga diperlukan upaya penguatan yang berkelanjutan pada seluruh aspek implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2018). *Evaluasi Program Pendidikan (Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan)*. Bumi Aksara.
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM Press.
- Jones, C. O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Rajawali.
- Keban, Y. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: konsep, teori dan isu*. Gava Media
- Korten, D. C. (1984). *People Centered Development*. Kumarian Press.
- Moleong, L. J. (2019a). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. UMSIDA Press.
- R.A. Kosnan. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Calpulis.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suntoro, I., & Hariri, H. (2015). *Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. CAPS. (Center Of Academic Publishing Service).

JURNAL

- Abadi, F., & Kohar Wakidul. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kota Padang Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 3(1).
- Abdiana, & Rusdi. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2(No. 1), 87-101.
- Adawiah, R. Al. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1(No. 2).
- Chandra, P. S., & Putri, S. E. S. (2021). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (Studi Kasus Pelaksanaan Program Ruang Bermain Anak Di Ruang Terbuka Hijau Kacang Mayang Kota Pekanbaru). *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1).
- Dewi Anggraini, La Ode Muhammad Elwan, & M. Najib Husain. (2024). Mewujudkan Kota Layak Anak Berbasis Kebutuhan Di Kota Kendari.

- Journal Publicuho*, 6(3), 1215–1225.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.337>
- Irwan, I., Damanik, E., Melia, Y., Elvawati, E., Jannah, L. I., & Lubis, G. C. (2022). Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 398–403.
<https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i2.1243>
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
<https://www.researchgate.net/publication/327762798>
- Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>
- Ramdhana, R., Stia, J., Haris Makassar, A., Amik, I., & Banggai, L. (2024). Efektivitas Program Kartu Nelayan Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai. *Ishak Meraja Journal*, 7(2).
- Sumarni, H. (2022). Analisis Implementasi Pelaksanaan Program Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Di RSUD Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.1(No.1).
- Tahir, A. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Gorontalo*.
- Vinsensia, F. M. (2023). *Kota Medan Sebagai Kota Layak Anak Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2022*.

WEBSITE

- Herdiana, R. (2024, March 18). *Pemkot Cimahi Jalin Sinergitas Pemangku Kebijakan Untuk Wujudkan Cimahi Kota Layak Anak*.
<https://Cimahikota.Go.Id/Berita/Detail/82486-Pemkot-Cimahi-Jalin-Sinergitas-Pemangku-Kebijakan-Untuk-Wujudkan-Cimahi-Kota-Layak-Anak>.

LANDASAN HUKUM

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 208 Tahun 2016 Tentang Kota Layak
Anak.